

LAPORAN KEUANGAN

*CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Unaudited)*



20
25



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tanjungpinang, 15 Januari 2026



Kepala Sekretariat,

Sulaiman, S.Sos

Pembina/IV.a

NIP. 198007202010011014

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan Laporan Keuangan.....	3
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	3
II. Neraca.....	3
III. Laporan Operasional.....	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	4
V. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	4
A. Penjelasan Umum.....	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.....	25
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	28
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	31
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	32
VI. Lampiran.....	36

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 15 Januari 2025

Kepala Sekretariat,



Sulaiman, S.Sos
Pembina/IV.a
NIP. 198007202010011014

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Unaudited Bawaslu Kota Tanjungpinang Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.002.154.599,- atau mencapai 97.74% dari alokasi anggaran sebesar Rp4.094.746.000,-

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp161.105.500 yang terdiri dari Aset Tetap sebesar Rp Rp147,305,500,- dan Aset Lancar sebesar Rp0,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp161.105.500.-

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp3.917.982.023 sehingga terdapat Defisit dari kegiatan Operasional senilai Rp(3.917.982.023).

Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos - pos Luar Biasa masing - masing sebesar Rp2.568.008,- dan sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(3.915.414.015).

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan. Ekuitas pada tanggal 1 Desember 2025 adalah sebesar Rp881.870.144,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(3.915.414.015) dikurangi koreksi lain-lain sebesar Rp151.310.315,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp3.331.933.862,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp147.079.676.-

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun periode berakhir 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN KEUANGAN (*UNAUDITED*)

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGPINANG**

TAHUN 2025

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG **LAPORAN REALISASI ANGGARAN** **PER 31 DESEMBER 2025**

(dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	2.568.008	0%	0,00
Jumlah Pendapatan		-	2.568.008	0%	0,00
BELANJA					
Belanja Operasional					
Belanja Pegawai	B.2	2.022.361.000	1.944.992.566	96,17	64.746.000
Belanja Barang	B.3	1.958.885.000	1.944.964.033	99,29	731.165.708
Jumlah Belanja Operasional		3.981.246.000	3.889.956.599	97,70	795.911.708
Belanja Modal					
Belanja Modal	B.4	113.500.000	112.198.000	98,85	0,00
Jumlah Belanja Modal		113.500.000	112.198.000	98,85	0,00
JUMLAH BELANJA		4.094.746.000	4.002.154.599	97,74	0,00

II. NERACA

SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Lainnya dan Setara Kas		0,00	818.963.044
Belanja Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan		0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		0,00	818.963.044
ASET TETAP			
Tanah	C.1	10.000.000	10.000.000
Peralatan dan Mesin	C.2	659.481.413	664.556.114
Akumulasi Penyusutan	C.3	(502.066.213)	(611.649.014)
Jumlah Aset Tetap		167.415.200	62.907.100
ASET LAINNYA			
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.4	13.800.000	0,00
Aset Lain-Lain	C.5	117.272.701	0,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.6	(117.272.701)	0,00
Jumlah Aset Lainnya		13.800.000	0,00
JUMLAH ASET		181.215.200	881.870.144
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.7	14.025.824	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		14.025.824	0,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.8	147.079.676	881.870.144
JUMLAH EKUITAS		147.079.676	881.870.144
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		161.105.500	881.870.144

III. LAPORAN OPERASIONAL

SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00
BEBAN		
Beban Pegawai	1.945.218.390	64.746.000
Beban Persediaan	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa	998.078.742	308.101.108
Beban Pemeliharaan	48.145.000	19.395.000
Beban Perjalanan Dinas	898.740.291	403.669.600
Beban Penyusutan dan Amortisasi	27.799.600	18.138.570
JUMLAH BEBAN	3.917.982.023	814.050.278
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3.917.982.023)	(814.050.278)
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	2.568.000	0,00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	2.568.000	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8	0,00
Jumlah Surplus (defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	2.568.008	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah Surplus (defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

URAIAN	2025	2024
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	8	0.00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8	0.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.00	0.00
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.568.008	0.00
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0.00	0.00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3.915.414.015)	(814.050.278)
POS LUAR BIASA	0.00	0.00
SURPLUS/DEFISIT LO	(3.915.414.015)	(814.050.278)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG LAPORAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2025

(dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	881.870.144	0.00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3.915.414.015)	(814.050.278)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR		0.00	0.00
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.3	(151.310.315)	1.335.000
Penyesuaian Nilai Aset			
Koreksi Nilai Persediaan			
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.1	0.00	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0.00	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.2	0.00	1.335.000
Koreksi Lain-Lain	E.3.3	(151.310.315)	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	3.331.933.862	1.694.585.422
Ditagihkan ke Entitas Lain	E.4.1	(3.334.501.870)	0.00
Diterima dari Entitas Lain		0.00	(0.00)
Pengesahan Hibah Langsung	E.4.2	2.568.008	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung		0.00	0.00
Pengesahan Hibah Langsung TAYL		0.00	0.00
Transfer Masuk	E.4.3	0.00	0.00
Transfer Keluar		0.00	0.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(734.790.468)	881.870.144
EKUITAS AKHIR	E.6	147.079.676	881.870.144

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Pusat.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0517/BAWASLU/SJ/KU.02/XII/2020 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2024 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1452).
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2024 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1452).
20. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-27/PB/PB.6/2025 Hal Penerapan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2025 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga.
21. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.686239/2024 Tanggal 28 November 2024.

A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rencana Strategis Bawaslu

Bawaslu ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 70 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 89 bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.

Visi Bawaslu

“Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”.

Penjelasan Visi:

Demokrasi substansial ditandai dengan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih baik pada level pusat maupun lokal secara kompetitif, jujur, dan adil. Berkaitan dengan hal itu, upaya memperkuat demokrasi substansial merupakan tugas seluruh elemen bangsa yang meniscayakan adanya peran warga negara/masyarakat sipil, antara warga negara/masyarakat sipil dengan institusi negara/pemerintah dan antar-institusi negara/pemerintah yang terbangun secara kolaboratif.

Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan menempatkan Bawaslu secara hierarkis sebagai lembaga Pengawas Pemilu yang berfungsi untuk memastikan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik dalam kerangka demokrasi substansial melalui tugas Pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Fungsi tersebut hanya mungkin dilaksanakan dalam kerangka Pengawasan Pemilu yang berintegritas yang meliputi: integritas kelembagaan Pengawas Pemilu, integritas proses Pemilu, dan integritas hasil Pemilu.

Integritas kelembagaan Pengawas Pemilu berkaitan dengan kemampuan Pengawas Pemilu baik secara kelembagaan maupun personal untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu secara profesional, dan akuntabel.

Integritas proses Pemilu berkaitan dengan adanya perlindungan hak pilih baik hak memilih maupun hak dipilih bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat, jaminan keadilan Pemilu dimana terdapat prosedur menyampaikan keluhan; koreksi kekeliruan administratif; pencegahan dan penindakan pelanggaran politik uang, netralitas ASN, anggota TNI/Polri, maupun pihak-pihak lain yang diwajibkan netral dalam penyelenggaraan Pemilu; politik identitas dan hoaks dalam penyelenggaraan Pemilu; dan jaminan bagi Pemilih untuk berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya.

Integritas hasil Pemilu berkaitan dengan adanya kemurnian hasil Pemilu dimana suara yang tercoblos sama dengan suara yang dihitung, direkapitulasi dan dikonversi menjadi kursi atau kandidat terpilih.

Demokrasi substansial menjadi syarat penting mewujudkan cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga negara, Bawaslu memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi substansial melalui Pengawasan Pemilu yang berintegritas yakni Pengawasan Pemilu

oleh Pengawas Pemilu yang profesional dan akuntabel serta didukung oleh birokrasi Pengawas Pemilu yang prima berbasis teknologi informasi maupun kolaborasi partisipatif Pengawas Pemilu dengan masyarakat sipil dan peran serta pemangku kepentingan untuk memastikan Pemilu kompetitif, jujur, dan adil.

Misi Bawaslu

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2025-2029. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan;
2. Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil; dan
3. Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik.

Tujuan Bawaslu

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;
3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2025-2029 adalah:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif;
3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Bawaslu

Kota Tanjungpinang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu diterapkan sistem informasi manajemen keuangan negara yang terintegrasi yang didukung dengan sistem sakti. Sistem SAKTI yang selanjutnya disebut SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

A.4 Basis Akuntansi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 Unaudited telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bawaslu mengacu pada kebijakan akuntansi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kementerian Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan - LRA

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan - LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Berdasarkan klasifikasi ekonomi, maka belanja dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.

- c. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- d. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Negara (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh Bendahara Umum Negara (SPHL/SP3HL).
- e. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- f. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- g. Belanja disajikan dalam LRA dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- 1) Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepri. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas dan Setara Kas disajikan dalam Neraca dan diungkapkan secara memadai di

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- 2) Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh pemerintah dan/atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian. kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. yang diharapkan diterima pemerintah dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- 3) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- 4) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.50%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- 5) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12

bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- 6) Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca menurut jenis-jenis piutang dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Khusus untuk putusan pengadilan yang menyatakan bahwa uang pengganti perkara tindak pidana korupsi harus disetorkan selain ke kas negara (kas daerah/BUMN/BUMD) maka tagihan uang pengganti tersebut tidak disajikan pada pos aset lancar di neraca, tetapi diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Aset Tetap

- 1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- 3) Untuk barang-barang yang memenuhi kriteria aset tetap walaupun dibeli dari MAK yang bukan peruntukannya, maka barang-barang tersebut tetap dibukukan sesuai dengan substansinya (*substance over form*).
- 4) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- 5) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
- 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- 4) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 5) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 6) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan. Jaringan. dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar. Aset Tetap. dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud. tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan. aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan). dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto. yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas. dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas. tidak dilakukan amortisasi.
- 4) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai

buku. yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - 1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga. Belanja yang Masih Harus Dibayar. Pendapatan Diterima di Muka. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - 2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- c. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Bawaslu Kota Tanjungpinang telah mengadakan 2 (Dua) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pimpinan lembaga terkait pelaksanaan tahapan pengawasan pemilihan umum tahun 2025. Diantaranya penambahan pagu anggaran untuk Program Dukungan Manajemen. Rincian revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Daftar DIPA Awal dan DIPA Revisi Tahun 2025

Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Pagu Sebelum Revisi	Pagu Setelah Revisi	Alasan Revisi
0 (Awal)	02 Desember 2024	3.716.504.000,00	3.716.504.000,00	-
1 (DJA)	21 Februari 2025	3.716.504.000,00	2.040.711.000,00	Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran
2 (KANWIL)	09 April 2025	2.040.711.000,00	2.708.366.000,00	Pemutakhiran data hasil revisi POK, Pencantuman /Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
3 (DJA)	10 Juli 2025	2.708.366.000,00	3.353.773.000,00	Optimalisasi penggunaan anggaran melalui Revisi POK, dan Pencantuman /Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
4 (KANWIL)	13 Juli 2025	3.353.773.000,00	3.353.773.000,00	Optimalisasi penggunaan anggaran melalui Revisi POK, dan Pencantuman /Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
5 (KANWIL)	27 Agustus 2025	3.353.773.000,00	3.353.773.000,00	Optimalisasi penggunaan anggaran melalui Revisi POK, dan Pencantuman /Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
6 (DJA)	03 Oktober 2025	3.353.773.000,00	3.436.048.000,00	Optimalisasi penggunaan anggaran melalui Revisi POK, dan Pencantuman /Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
7 (KANWIL)	08 Oktober 2025	3.436.048.000,00	3.436.048.000,00	Optimalisasi penggunaan anggaran melalui Revisi POK, dan Pencantuman

Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Pagu Sebelum Revisi	Pagu Setelah Revisi	Alasan Revisi
				/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
8 (KANWIL)	14 Oktober 2025	3.436.048.000,00	3.436.048.000,00	Optimalisasi penggunaan anggaran melalui Revisi POK, dan Pencantuman /Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
9 (DJA)	03 November 2025	3.436.048.000,00	4.094.746.000,00	Optimalisasi penggunaan anggaran melalui Revisi POK, Penambahan Belanja Modal, dan Pencantuman /Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
10 (KANWIL)	02 Desember 2025	4.094.746.000,00	4.094.746.000,00	Optimalisasi penggunaan anggaran melalui Revisi POK, dan Pencantuman /Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
11 (KANWIL)	12 Desember 2025	4.094.746.000,00	4.094.746.000,00	Optimalisasi penggunaan anggaran melalui Revisi POK, dan Pencantuman /Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
12 (KANWIL)	22 Desember 2025	4.094.746.000,00	4.094.746.000,00	Optimalisasi penggunaan anggaran melalui Revisi POK, dan Pencantuman /Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.568.008.00.-. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepri adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2025

Uraian	2025	
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2.568.008
Total	0	2.568.008

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.568.008,- yang jika dibandingkan dengan 31 Desember 2024 tidak terdapat kenaikan maupun penurunan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3
Rincian Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2025

Pendapatan	Realisasi		Naik (Turun) %
	2025	2024	
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	2.568.000	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	8	-	-
Total	2.568.008	-	-

Pendapatan sebesar Rp2.568.008,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan sebesar Rp2.568.000,- merupakan pendapatan dari hasil penjualan Peralatan dan Mesin dengan nomor NTPN 8781161QVDTMV14Q Tanggal 23 Desember 2025.
- b. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL) sebesar Rp8,- merupakan potongan lain-lain pada SPM Kekurangan Gaji Pegawai Tahun 2025 dengan Nomor SP2D 259991310503576 Tanggal 25 Agustus 2025.

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.002.154.599,- atau 97.74% persen dari anggaran belanja sebesar Rp4.094.746.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 4
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	2.022.361.000	1.944.992.566	96.17
Belanja Barang (RM)	1.958.885.000	1.944.964.033	99.29
Belanja Modal	113.500.000	112.198.000	98.85
Total Belanja Kotor	4.094.746.000	4.002.154.599	97.74
Pengembalian Belanja	92.591.401	0	0
Total Belanja Bersih	4.094.746.000	4.002.154.599	97.74

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.944.992.566,- atau 96.17

persen dari anggaran belanja pegawai sebesar Rp2.022.361.000.-.

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.944.964.033.- atau 99.29 persen dari anggaran belanja barang sebesar Rp1.958.885.000.-. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	493.787.000	490.778.392	99.4
Belanja Barang Non Operasional	64.705.000	57.915.150	89.51
Belanja Jasa	451.426.000	449.385.200	99.55
Belanja Pemeliharaan	48.320.000	48.145.000	99.64
Belanja Perjalanan Dinas	900.710.000	898.801.271	99.78
Total	1.958.885.000	1.945.025.013	99.29

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp113.500.000.- atau 98.85 persen dari anggaran belanja barang sebesar Rp112.198.000.-. Rincian anggaran dan realisasi belanja Modal per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 6
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.500.000	112.198.000	98.85
Total		112.198.000	98.85

Tabel 7
Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

NO	URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH
1	Neon Box	1	24.198.000
2	Camera Canon EOS M50	1	15.000.000
3	Video Conference	1	25.000.001
4	Lenovo Idea Pad	3	47.999.999
	JUMLAH		112.198.000

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp693.980.413.- Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 8
Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

132111	Peralatan dan Mesin			
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	10	39.081.000
3050104007	Brandkas	Buah	1	4.580.000
3050104025	Lemari Katalog	Buah	6	15.000.000
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	6	11.865.000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	5.945.000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	4.485.000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	1	7.200.000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	5.240.001
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	634.000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	32	70.046.000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	59	59.389.000
3050201005	Sice	Buah	4	23.840.000
3050201008	Meja Rapat	Buah	1	23.300.000
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	1	4.970.000
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	3.260.001
3050204001	Lemari Es	Buah	1	2.500.000
3050204004	A.C. Split	Buah	11	54.612.502
3050206008	Sound System	Buah	2	11.963.001
3050206016	Mic Conference	Buah	2	18.200.000
3050206020	Camera Video	Buah	1	15.805.000
3050206042	Lambang Instansi	Buah	1	24.198.000
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	2	9.943.708
3060101037	Microphone/Boom Stand	Buah	2	2.400.000
3060101079	Microphone Cable	Buah	1	1.000.000
3060101088	Voice Recorder	Buah	2	1.900.000
3060102128	Camera Digital	Buah	1	15.000.000
3060102132	Video Conference	Buah	1	25.000.001
3060102165	Camera Conference	Buah	1	1.230.000
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	1	3.444.000
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Buah	1	2.676.000
3100102001	P.C Unit	Buah	9	85.618.800
3100102002	Lap Top	Buah	7	104.692.000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	5	11.392.000
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	22.099.200
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	4	4.299.200
JUMLAH			184	693.980.413

C.2 Persediaan

Saldo Persediaan periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.00.

C.3 Tanah

Saldo aset tetap berupa Tanah periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 10.000.000.00 dan Saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Saldo Tanah per 31 Desember 2025

No	Kode	Nama Barang	Kuantitas	Saldo
1	2.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	10.000.000
Total			1	10.000.000

C.4 Akumulasi penyusutan aset tetap

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. (502.066.213) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode yang berakhir 31 Desember 2025. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 10
Rincian Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

Akun	Uraian	Satuan	Kuantitas	Nilai	Penyusutan	Nilai Buku
132111	Peralatan dan Mesin					
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	10	39.081.000	(39.081.000)	0
3050104007	Brandkas	Buah	1	4.580.000	(4.580.000)	0
3050104025	Lemari Katalog	Buah	6	15.000.000	(15.000.000)	0
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	6	11.865.000	(11.865.000)	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	5.945.000	(5.945.000)	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	4.485.000	(4.485.000)	0
3050105017	Mesin Absensi	Buah	1	7.200.000	(2.160.000)	5.040.000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	5.240.001	(5.240.001)	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	32	70.046.000	(70.046.000)	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	11	27.424.000	(27.424.000)	0
3050201005	Sice	Buah	4	23.840.000	(23.840.000)	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	1	23.300.000	(23.300.000)	0
3050201014	Meja Resepsi	Buah	1	4.970.000	(4.970.000)	0
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	3.260.001	(3.260.001)	0
3050204001	Lemari Es	Buah	1	2.500.000	(500.000)	2.000.000
3050204004	A.C. Split	Buah	11	54.612.502	(54.612.502)	0
3050206008	Sound System	Buah	2	11.963.001	(11.963.001)	0
3050206016	Mic Conference	Buah	2	18.200.000	(18.200.000)	0
3050206020	Camera Video	Buah	1	15.805.000	(15.805.000)	0
3050206042	Lambang Instansi	Buah	1	24.198.000	0	24.198.000
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	2	9.943.708	(9.943.708)	0
3060101037	Microphone/Boom Stand	Buah	2	2.400.000	(2.400.000)	0
3060101079	Microphone Cable	Buah	1	1.000.000	(1.000.000)	0
3060102128	Camera Digital	Buah	1	15.000.000	0	15.000.000
3060102132	Video Conference	Buah	1	25.000.001	0	25.000.001
3060102165	Camera Conference	Buah	1	1.230.000	(738.000)	492.000
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	1	3.444.000	(688.800)	2.755.200
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Buah	1	2.676.000	(2.676.000)	0
3100102001	P.C Unit	Buah	9	85.618.800	(85.618.800)	0
3100102002	Lap Top	Buah	7	101.863.999	(20.226.500)	81.637.499
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	5	11.392.000	(11.392.000)	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	22.099.200	(20.806.700)	1.292.500
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	4	4.299.200	(4.299.200)	0
JUMLAH			133	659.481.413	(502.066.213)	157.415.200

C.5 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp161.105.500. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara asset senilai Rp. 181.215.200 dan kewajiban senilai Rp14.025.824. Penjelasan lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.945.218.390,- dan Rp64.746.000,-

Tabel 11
Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	2025 (Rp)	2024 (Rp)	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	180.608.422	0	100
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	462.083.100	64.746.000	613,68
Belanja dan Tunjangan PPPK	643.857.045	0	100
Belanja Lembur	32.597.000	0	100
Belanja Tunjangan Kinerja	626.032.195	0	100
Jumlah Belanja Kotor	1.945.177.762	64.746.000	2.904,32
Pengembalian Belanja Pegawai	185,196	0	0
Total	1.944.992.566	64.746.000	2.904,32

Pada Tahun 2025 Beban Pegawai mengalami kenaikan sebesar 2.904,32 persen dibandingkan tahun 2024 dikarenakan :

1. Adanya penambahan Pegawai PNS dan PPPK di Bawaslu Kota Tanjungpinang;
2. Adanya pembayaran atas penyesuaian Tunjangan Fungsional, Kenaikan Pangkat, dan Kenaikan Gaji Berkala PNS;
3. Adanya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Gaji dan THR Tunjangan Kinerja yang dibayarkan pada periode Maret 2025;
4. Adanya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Pejabat Struktural, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepri yang dibayarkan pada periode Maret 2025;
5. Adanya pembayaran Uang Lembur PNS Bulan Desember 2025.

Beban pegawai per 31 Desember 2025 merupakan beban yang diperoleh dari hasil Mutasi sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	0
Mutasi Tambah:		
- Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp	180.608.422
- Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	Rp	462.083.100
- Belanja dan Tunjangan PPPK	Rp	643.857.045
- Belanja Lembur	Rp	32.597.000
- Belanja Tunjangan Kinerja	Rp	626.032.195
- Belanja Kekurangan Gaji PPPK	Rp	225.824
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	1.945.402.086

Mutasi Kurang:

- Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Rp 185.196

Jumlah Mutasi Kurang	Rp	185.196
Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2025	Rp	1.945.218.390

Terdapat selisih beban pegawai antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional sebesar Rp225.824,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 12
Rincian Selisih Beban Pegawai per 31 Desember 2025

No	Akun	Uraian	Nominal
1	511611	Pembayaran KGB Pembulatan Gaji PPPK	32
2	511621	Pembayaran KGB Tunjangan Anak PPPK	4.032
3	511622	Pembayaran KGB Tunjangan Istri/Suami PPPK	20.160
4	511619	Pembayaran KGB Gaji Pokok PPPK	201.600
Total			225.824

D.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp998.078.742,- atau 61.8%. dengan rincian anggaran dan realisasi beban per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 13
Rincian Anggaran dan Realisasi beban per 31 Desember 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	404.361.892	223.942.980	80,56
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	55.604.000	6.748.000	724,01
Beban Barang Operasional Lainnya	30.812.500	26.918.000	14,47
Beban Bahan	47.909.885	16.550.500	189,48
Beban Barang Non Operasional Lainnya	10.005.265	-	0
Beban Langganan Listrik	39.004.600	18.027.500	116,36
Beban Sewa	307.080.600	-	0
Beban Jasa Profesi	31.800.000	14.400.400	120,83
Beban Jasa Lainnya	71.500.000	-	0
Beban Langganan Air	-	1.514.128	0
Jumlah Belanja Kotor	998.078.742	308.101.108	223,95
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total	998.078.742	308.101.108	223,95

D.3 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp48.145.000,- dan Rp19.395.000.

Tabel 14
Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.145.000	19.395.000	148,23
Total	48.145.000	19.395.000	148,23

Terjadi kenaikan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 sebesar 148,23 persen dibandingkan pada 31 Desember 2024 hal ini dikarenakan kebutuhan untuk perawatan dan pergantian sparepart kendaraan dinas yang kondisinya sudah usang dan rusak serta Perawatan Inventaris Peralatan Perkantoran.

D.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp898.740.291,- dan Rp403.669.600,-.

Tabel 15
Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	227.178.849	0	100
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	53.910.000	0	100
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	334.508.500	0	100
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	283.203.922	403.669.600	-29,84
Jumlah Bruto	1.945.025.013	403.669.600	381,84
Pengembalian Belanja	60.980	0	0
Jumlah Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.944.964.033	403.669.600	381,84

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 100 persen dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas pada periode yang sama tahun 2024. Kenaikan Beban Perjalanan Dinas dikarenakan melaksanakan Uji Petik Pemilih Berkelanjutan (PPBD) Triwulan II, Pengawasan Pemutakhiran Data Parpol, Memenuhi Undangan Kegiatan dari Bawaslu RI.

D.5 Surplus/Defisit LO

Defisit LO untuk per 31 Desember 2025 sebesar Rp(3.895.078.491,-).

E. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Kementerian/Lembaga adalah kekayaan bersih Kementerian/Lembaga yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban kementerian pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp147.079.676.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp(3.915.414.015). Defisit Laporan Operasional merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Nilai Koreksi pada tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0.00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp3.331.933.862.-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp147.079.676.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Pengungkapan Pengembangan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan. Tugas. Fungsi. Wewenang. Organisasi. Tata Kerja. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu dan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu. Dalam menjalankan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dibantu oleh Bagian Administrasi. Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat dan Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum.

Berikut Struktur Pengelola Keuangan di Bawaslu Kota Tanjungpinang dan terdapat beberapa kali perubahan disampaikan sebagaimana berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang nomor : 001/KU.01.00/KR-06/01/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024

A. Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang terdiri atas:

- 1) Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen : **Buana Fauzi Februari. SE.. SH.. MM**
 - 2) PPSPM : **Khairul. SE**
 - 3) Bendahara Pengeluaran : **Bambang Raharjo. S.Sos**
 - 4) Staf Pengelola Keuangan : **Mukhlis. SE**
 - 5) Staf Pengelola BMN : **Irma Aprilliana. SE**
2. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang nomor : 073/KU.01.00/KR-06/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024

B. Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang terdiri atas:

- 1) Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen : **Sulaiman. S.Sos**
- 2) PPSPM : **Khairul. SE**
- 3) Staf Pengelola Keuangan : **Mukhlis. SE**
- 4) Staf Pengelola BMN : **Dede Nugraha Sukandar. S.AP**

3. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang nomor : 073/KU.01.00/KR-06/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024

C. Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang terdiri atas:

- 1) Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen : **Sulaiman. S.Sos**
- 2) PPSPM : **Dwi Suharani Raja Guk Guk. SE**
- 3) Bendahara Pengeluaran : **Khairul. SE**
- 4) Staf Pengelola Keuangan : **Mukhlis. SE**
- 5) Staf Pengelola BMN : **Dede Nugraha Sukandar. S.AP**

4. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang nomor : 034/KU.01.00/KR-06/107/2025 tanggal 07 Juli 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024

D. Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang terdiri atas:

- 1) Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen : **Sulaiman. S.Sos**
- 2) PPSPM : **Dwi Suharani Raja Guk Guk. SE**
- 3) Bendahara Pengeluaran : **Grace Usniarta Sihombing. S.Tr.Akun**
- 4) Staf Pengelola Keuangan : **Mukhlis. SE**
- 5) Staf Pengelola BMN : **Dede Nugraha Sukandar. S.AP**

F.2 Pengungkapan Lain-Lain

1. Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah yang masih digunakan dalam kegiatan operasional di lingkungan Bawaslu Kota Tanjungpinang sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebanyak 1 rekening yaitu Rekening (BPG).

2. Pejabat Perbendaharaan

Adapun pejabat perbendaharaan per tanggal 31 Desember 2025 selaku Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penangguna Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen. Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM. dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

Tabel 16
Pejabat Perbendaharaan

No.	Nama Pegawai	Jabatan
1	Sulaiman. S.Sos	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Vera Marini Situmeang, S.E	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Dwi Suharani Raja Guk Guk. SE	Penandatangan SPM
4	Grace Usniarta Sihombing. S.Tr.Akun	Bendahara Pengeluaran

F.3 Capaian Output

Capaian Output Bawaslu Kota Tanjungpinang dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Capaian Output untuk Kegiatan Pelaksanaan Non Tahapan

Tabel 17
Rincian Capaian Output

No.	Kode	Kegiatan	Persen Realisasi
1	CQ.5245.BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	47.56
2	CQ.5245.BIC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	94.48
3	CQ.5245.BIC.003	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota- Kabupaten/Kota 01	100
4	CQ.7014.QIC.002	Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	99.44

5	WA.4355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	78.37
6	WA.4356.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu	95.85
7	WA.4356.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	0
8	WA.6849.EBA.956	Layanan BMN	78.37
9	WA.6849.EBA.994	Layanan Perkantoran	97.01
10	WA.6849.EBB.951	Layanan Sarana Internal	98.85
11	WA.6849.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	13.33
12	WA.6849.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100
13	WA.6849.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	100
14	WA.6849.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	9.46
15	WA.6850.EBA.957	Layanan Hukum	71.65
16	WA.6850.EBA.962	Layanan Umum	99.41
17	WA.6850.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	0
18	WA.6850.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	96.59

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 115
ESELON I : Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum 01
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG 419772

Tgl Data : 18/02/26 1:56 AM
Tgl Cetak : 18/02/26 8:24 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	2,568,008	2,568,008	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	2,568,008	2,568,008	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	2,568,008	2,568,008	0	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	4,094,746,000	4,002,154,599	(92,591,401)	97.74	1,287,886,000	795,911,708	(491,974,292)	61.8
1. Belanja Pegawai	2,022,361,000	1,944,992,566	(77,368,434)	96.17	64,830,000	64,746,000	(84,000)	99.87
2. Belanja Barang	1,958,885,000	1,944,964,033	(13,920,967)	99.29	1,223,056,000	731,165,708	(491,890,292)	59.78
3. Belanja Modal	113,500,000	112,198,000	(1,302,000)	98.85	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 115
ESELON I : Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum 01
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG 419772

Tgl Data : 18/02/26 1:56 AM
Tgl Cetak : 18/02/26 8:24 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	4,094,746,000	4,002,154,599	(92,591,401)	97.74	1,287,886,000	795,911,708	(491,974,292)	61.8
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

TANJUNGPINANG, 18 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran`

SULAIMAN
NIP 198007202010011014

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU

SATUAN KERJA : (419772) SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG

Tgl Data : 18/02/26 1:56 AM

Tgl Cetak : 18/02/26 8:23 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	818,963,044	(818,963,044)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	0	818,963,044	(818,963,044)	(100.00)
ASET TETAP				
Tanah	10,000,000	10,000,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	659,481,413	664,556,114	(5,074,701)	(0.76)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(522,175,913)	(611,649,014)	89,473,101	(14.63)
JUMLAH ASET TETAP	147,305,500	62,907,100	84,398,400	134.16
ASET LAINNYA				
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	13,800,000	0	13,800,000	0.00
Aset Lain-lain	117,272,701	0	117,272,701	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(117,272,701)	0	(117,272,701)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	13,800,000	0	13,800,000	
JUMLAH ASET	161,105,500	881,870,144	(720,764,644)	(81.73)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	14,025,824	0	14,025,824	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	14,025,824	0	14,025,824	
JUMLAH KEWAJIBAN	14,025,824	0	14,025,824	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	147,079,676	881,870,144	(734,790,468)	(83.32)
JUMLAH EKUITAS	147,079,676	881,870,144	(734,790,468)	(83.32)
JUMLAH EKUITAS	147,079,676	881,870,144	(734,790,468)	(83.32)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	161,105,500	881,870,144	(720,764,644)	(81.73)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

TANJUNGPINANG, 18 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran`

SULAIMAN

NIP 198007202010011014

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : (419772) SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG

Tgl Data : 18/02/26 1:56 AM
Tgl Cetak : 18/02/26 8:24 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	1,945,218,390	64,746,000	1,880,472,390	2,904.384
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	998,078,742	308,101,108	689,977,634	223.945
Beban Pemeliharaan	48,145,000	19,395,000	28,750,000	148.234
Beban Perjalanan Dinas	898,740,291	403,669,600	495,070,691	122.643
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (115) **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : (01) **Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**
WILAYAH/PROVINSI : (3200) **KEPULAUAN RIAU**
SATUAN KERJA : (419772) **SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG**

Tgl Data : 18/02/26 1:56 AM

Tgl Cetak : 18/02/26 8:24 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	27,799,600	18,138,570	9,661,030	53.262
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	3,917,982,023	814,050,278	3,103,931,745	381.295
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3,917,982,023)	(814,050,278)	(3,103,931,745)	381.295
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	2,568,000	0	2,568,000	
Pendapatan Pelepasan Aset	2,568,000	0	2,568,000	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8	0	8	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8	0	8	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	2,568,008	0	2,568,008	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3,915,414,015)	(814,050,278)	(3,101,363,737)	380.979
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3,915,414,015)	(814,050,278)	(3,101,363,737)	380.979

SULAIMAN
NIP 198007202010011014

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU

SATUAN KERJA : (419772) SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG

Tgl Data : 18/02/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 18/02/26 8:24 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	881,870,144	0	881,870,144	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,915,414,015)	(814,050,278)	(3,101,363,737)	380.98
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(151,310,315)	1,335,000	(152,645,315)	(11,434.11)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	1,335,000	(1,335,000)	(100)
LAIN-LAIN	(151,310,315)	0	(151,310,315)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,331,933,862	1,694,585,422	1,637,348,440	96.62
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(734,790,468)	881,870,144	(1,616,660,612)	(183.32)
EKUITAS AKHIR	147,079,676	881,870,144	(734,790,468)	(83.32)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

TANJUNGPINANG, 18 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran`

SULAIMAN

NIP 198007202010011014

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115

UNIT ORGANISASI : 01

WILAYAH/PROVINSI : 3200

SATUAN KERJA : 419772

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

KEPULAUAN RIAU

SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG

Tgl. Cetak 20/02/2026 11:55 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	818,963,044	0
0.0	131111	Tanah	10,000,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	664,556,114	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	611,649,014
0.0	391111	Ekuitas	0	881,870,144
JUMLAH			1,493,519,158	1,493,519,158

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU

SATUAN KERJA : (419772) SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG

Tgl Data : 18/02/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 18/02/26 8:21 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	4,002,154,599
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	2,568,008	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	2,568,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	110,791,060	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2,054	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	7,959,122	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	2,871,649	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	12,250,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	207,597	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	7,748,940	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	34,893,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	3,885,000	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	462,083,100	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	446,408,000	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7,758	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	29,310,970	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	9,123,942	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	26,275,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	28,885,375	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	90,876,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	12,970,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	10,909,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	21,688,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	169,506,629	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	456,525,566	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	404,361,892	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	55,604,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	30,812,500	0
3.0	521211	Belanja Bahan	47,909,885	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	10,005,265	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	39,004,600	0
3.0	522141	Belanja Sewa	307,080,600	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	31,800,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	71,500,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48,145,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	227,178,849	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	53,910,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU

SATUAN KERJA : (419772) SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG

Tgl Data : 18/02/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 18/02/26 8:21 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	334,508,500	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	283,203,922	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112,198,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	196
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	185,000
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	60,980
JUMLAH			4,004,968,783	4,004,968,783

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

TANJUNGPINANG, 18 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran`

SULAIMAN

198007202010011014

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU

SATUAN KERJA : (419772) SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG

Tgl Data : 18/02/26 1:56 AM

Tgl Cetak : 18/02/26 8:18 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	131111	Tanah	10,000,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	659,481,413	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	522,175,913
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	13,800,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	117,272,701	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	117,272,701
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	225,824
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	13,800,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,334,501,870
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,568,008	0
0.0	391111	Ekuitas	0	881,870,144
0.0	391119	Koreksi Lainnya	151,310,315	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	2,568,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	110,791,060	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	1,858	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	7,959,122	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	2,871,649	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	12,250,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	207,597	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	7,748,940	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	34,893,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	3,700,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	462,083,100	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	446,609,600	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	7,790	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	29,331,130	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	9,127,974	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	26,275,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	28,885,375	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	90,876,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	12,970,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	10,909,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	21,688,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	169,506,629	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	456,525,566	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	404,361,892	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	55,604,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU

SATUAN KERJA : (419772) SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG

Tgl Data : 18/02/26 1:56 AM

Tgl Cetak : 18/02/26 8:18 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	30,812,500	0
3.0	521211	Beban Bahan	47,909,885	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	10,005,265	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	39,004,600	0
3.0	522141	Beban Sewa	307,080,600	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	31,800,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	71,500,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48,145,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	227,178,849	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	53,910,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	334,508,500	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	283,142,942	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	27,799,600	0
JUMLAH			4,872,414,460	4,872,414,460

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

TANJUNGPINANG, 18 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran`

SULAIMAN

NIP 198007202010011014

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUNAN TAHUN 2025

Kode dan Nama UAKPA : (419772) SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG
Kode dan Nama UAPPAW : (3200) KEPULAUAN RIAU
Kode dan Nama Eselon 1 : (01501)SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Kode dan Nama K/L : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya	
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	✓		Ada
2	Neraca Percobaan AkruaI	✓		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	✓		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		✓	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		✓	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		✓	Tidak

3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		✓	Tidak
	a. Pagu/DIPA		✓	Tidak
	b. Estimasi PNBP		✓	Tidak
	c. Belanja		✓	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		✓	Tidak
	e. Pendapatan		✓	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		✓	Tidak
	g. Kas BLU		✓	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		✓	Tidak
	i. Kas Hibah		✓	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		✓	Tidak
			✓	
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		✓	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		✓	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)		✓	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		✓	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		✓	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		✓	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		✓	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		✓	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		✓	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		✓	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	✓		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	✓		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	✓		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	✓		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		✓	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		✓	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		✓	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		✓	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		✓	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		✓	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		✓	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		✓	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		✓	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		✓	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		✓	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		✓	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		✓	Tidak

	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		✓	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		✓	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		✓	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		✓	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		✓	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		✓	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		✓	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		✓	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		✓	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		✓	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		✓	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		✓	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		✓	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		✓	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		✓	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		✓	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		✓	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		✓	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?		✓	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		✓	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?		✓	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		✓	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 2025 di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	✓		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	✓		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	✓		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	✓		Ya

5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito		✓	Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		✓	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		✓	Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		✓	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		✓	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		✓	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		✓	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang		✓	Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	✓		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	✓		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	✓		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	✓		Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		✓	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	✓		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	✓		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		✓	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		✓	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		✓	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja “Tidak Ada”		✓	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		✓	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		✓	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		✓	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		✓	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		✓	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		✓	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		✓	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		✓	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :		✓	Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)		✓	Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	✓		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	✓		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	✓		Ya/Tidak

5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan AkruaI?		✓	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		✓	Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		✓	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		✓	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		✓	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		✓	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual AkruaI pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan AkruaI		✓	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		✓	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan AkruaI		✓	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan AkruaI		✓	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)		✓	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan AkruaI		✓	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan AkruaI		✓	Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	✓		Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?	✓		Tidak
3	Apakah formula perhitugnan SAL pada LPSAL telah sesuai?	✓		Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaI BLU?	✓		Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	✓		Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?	✓		Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaI BLU?	✓		Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	✓		Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	✓		Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	✓		Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	✓		Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	✓		Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU	✓		Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
Mengetahui Penyusun LKKL,  (Dede Nugraha Sukandar, S.AP) NIP. 199112262024211020 Tanjungpinang, 18 Februari 2026 Penelaah,  (Vera Marini Situmeang, S.E) NIP. 198609102020122002				